

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Freeman (1984) mendefinisikan teori *stakeholder* adalah strategi serta kegiatan yang berhubungan dengan para *stakeholder*, norma-norma yang ada, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, penghormatan kepada masyarakat dan lingkungan, serta komitmen secara global dan peran serta perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan. Teori *stakeholder* menerangkan bahwa perusahaan dinilai tidak dapat membebaskan diri dari lingkungan sosial. Perusahaan diminta untuk bertanggung jawab tidak hanya pada perolehan profit dan kepentingan para pemegang saham, namun perusahaan turut harus memperhatikan masyarakat, pelanggan, pemasok dan lingkungan sebagai bagian dari aktivitas perusahaan di dalam teori *stakeholder* (Saputri & Fidiana, 2023); Sunarsih & Cahyani (2018); Sunarsih & Ferdiyansyah (2016); Sunarsih & Rosa (2017); Sunarsih & Nurhikmah (2017); Sunarsih & Dahlifah (2018); Fitriani and Sunarsih (2024). Sesuai dengan definisi dari teori *stakeholder*, para *stakeholders* memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan dan keberlanjutan perusahaan dikarenakan para *stakeholders* memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dibutuhkan dalam keberlangsungan dan keberlanjutan perusahaan.

Pengungkapan isu sosial dan isu lingkungan yang disajikan oleh perusahaan merupakan upaya manajemen perusahaan dalam menyatukan dan memelihara keterikatan dengan para *stakeholders*, dan pengungkapan yang diungkapkan oleh perusahaan dapat membantu para *stakeholders* dalam menentukan pilihan yang akan menguntungkan kedua belah pihak (Iratiwi & Sulfitri, 2023); Sunarsih & Cahyani (2018); Sunarsih & Ferdiyansyah (2016); Sunarsih & Rosa (2017); Sunarsih & Nurhikmah (2017); Sunarsih & Dahlifah (2018); Fitriani and Sunarsih (2024). Teori *stakeholder* berkaitan dengan *carbon emission disclosure* dalam hal transparansi, responsivitas, dan inisiatif perusahaan terhadap lingkungan sosial

(Yuniarto et al., 2024). Para *stakeholders* memiliki *power* untuk mengendalikan perusahaan dalam hal menjalankan aktivitas perusahaan salah satunya adalah pengungkapan emisi karbon (Dewayani & Ratnadi, 2021).

Isu terkait perubahan iklim dan pemanasan global menjadi kekhawatiran masyarakat dikarenakan memberikan dampak negatif yang cukup besar dalam keberlangsungan. Oleh sebab itu, perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas terutama dalam pengungkapan informasi terkait lingkungan di dalam laporan berkelanjutan. Pengungkapan emisi karbon memberikan gambaran kepada para *stakeholders* terkait kepedulian perusahaan terhadap isu-isu lingkungan. Para *stakeholders* dapat menilai pertanggungjawaban perusahaan akan dampak negatif yang dihasilkan oleh perusahaan dari pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan dalam aktivitas perusahaan. Para *stakeholder* dapat memantau, mengawasi, dan mengevaluasi aktivitas perusahaan yang berdampak langsung kepada lingkungan. Pengungkapan emisi karbon akan mengembangkan rasa kepercayaan para stakeholder kepada perusahaan (Setiadi & Nurwati, 2022).

2.1.2. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi dikemukakan pertama kali oleh Dowling & Pfeffer (1975) yang mendefinisikan bahwa legitimasi mengikutsertakan tindakan perusahaan terkait isu lingkungan dalam menentukan apakah perusahaan tersebut memperhatikan dan bertanggung jawab atas aktivitas perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan (Sativa, 2024). Namun, menurut Ghazali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa perusahaan harus selalu berupaya untuk menyelaraskan antara nilai-nilai sosial dalam aktivitas perusahaan dan standar yang diterapkan dalam sistem sosial masyarakat bahwa perusahaan adalah bagian dari sistem tersebut.

Teori legitimasi mengindikasikan bahwa kinerja lingkungan yang buruk dapat meningkatkan risiko perusahaan kehilangan legitimasi sosial, oleh karena itu perusahaan didorong untuk mengungkapkannya melalui laporan tahunan mereka. Teori legitimasi menyatakan bahwa entitas bisnis akan selalu berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas yang dijalankan berada pada ruang lingkup yang dapat diterima oleh masyarakat dan lingkungan sekitar (Dewayani & Ratnadi, 2021). Apabila masyarakat tidak merasa puas dan merasa dirugikan atas aktivitas

perusahaan maka saat itulah posisi itulah yang mengakibatkan legitimasi perusahaan akan terancam yang berakibat pada kelangsungan dan keberlangsungan perusahaan.

Legitimasi dapat dikatakan sebagai suatu pengakuan yang didapat oleh perusahaan dari masyarakat dengan cara melakukan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar (Pratama, 2021). Teori legitimasi digunakan untuk melindungi perusahaan dari *legitimation gap* salah satu diantaranya adalah dengan pengungkapan emisi karbon karena perusahaan akan dianggap baik oleh masyarakat dikarenakan perusahaan memberikan kesan yang baik terhadap isu-isu lingkungan (Maqfirah & Fahrianta, 2022). Teori legitimasi mendukung suatu entitas bisnis untuk melakukan pengungkapan sukarela termasuk pengungkapan emisi karbon (Asyari & Hernawati, 2023). Pengungkapan emisi karbon dalam laporan berkelanjutan merupakan salah satu bentuk upaya entitas bisnis untuk melaporkan aktivitas usahanya dalam rangka mengeksplorasi, pengendalian serta menjaga alam dan lingkungan (Widiawati & Hidayati, 2024); Sunarsih & Cahyani (2018); Sunarsih & Ferdiyansyah (2016); Sunarsih & Rosa (2017); Sunarsih & Nurhikmah (2017); Sunarsih & Dahlifah (2018); Fitriani and Sunarsih (2024). Teori legitimasi menekankan pentingnya hubungan antara perusahaan dengan lingkungan dalam memahami tugas dan tanggung jawab perusahaan dalam mengatasi isu-isu ekonomi, sosial, dan lingkungan (Sativa, 2024).

2.1.3. Pengungkapan Emisi Karbon (*Carbon Emission Disclosure*)

Emisi karbon merupakan gas pembuangan yang dilepaskan ke atmosfer bumi dihasilkan dari hasil pembakaran bahan bakar yang mengandung karbon (Claudia & Halik, 2024); Fitriani and Sunarsih (2024). Emisi karbon yang terus dihasilkan dalam jumlah yang besar secara terus-menerus akan mengakibatkan pemanasan global yang berakhir terganggunya ekosistem di bumi. Emisi karbon berasal dari aktivitas manusia tanpa memperhatikan kondisi lingkungan dalam jangka panjang yang mengakibatkan tingkat karbon dioksida semakin meningkat sehingga tidak dapat diserap oleh alam (Kurnia et al., 2021); Fitriani and Sunarsih (2024). Kondisi inilah yang mengakibatkan pemanasan global.

Fenomena tersebut mendorong masyarakat terutama pelaku usaha untuk mempertanggung jawabkan emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas perusahaannya yang diungkapkan dalam laporan berkelanjutan. Pengungkapan emisi karbon merupakan suatu pengungkapan tanggung jawab lingkungan yang menyajikan data kinerja karbon perusahaan di masa lalu dan dampaknya di masa yang akan datang, serta informasi lain yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim yang diungkapkan kepada para pemangku kepentingan (Pitrakkos & Maroun, 2020).

Perusahaan akan mengungkapkan kontribusinya dalam rangka menekan jejak karbon, seperti upaya dalam penghematan energi, penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan serta besarnya volume emisi yang dihasilkan oleh perusahaan dalam pengungkapan emisi karbon (Oktariyani, 2024). Namun, pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih bersifat sukarela (*voluntary*) sehingga masih sedikit perusahaan yang menyajikan pengungkapan emisi karbon di dalam laporannya (Syabilla et al., 2021); Fitriani and Sunarsih (2024). Perusahaan mengungkapkan emisi karbon di dalam laporan tahunan atau laporan berkelanjutan. Pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menekan tingkat emisi karbon yang terus meningkat (Sari & Nisa, 2020).

2.1.4. *Environmental Management System*

Sistem manajemen lingkungan atau *environmental management system* adalah suatu cara sistematis untuk mengelola berbagai aspek lingkungan suatu perusahaan. ISO 14001 adalah suatu standar yang diakui secara internasional untuk sistem manajemen lingkungan (ISO 14001:2015). ISO 14001 menggunakan pendekatan terstruktur untuk perencanaan dan implementasi proteksi lingkungan. Sistem manajemen lingkungan merupakan komponen penting dari sistem manajemen perusahaan yang terdiri dari seperaturan sistematis yang mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya untuk menerapkan kebijakan lingkungan yang ditetapkan (Utomo et al., 2021); Fitriani and Sunarsih (2024).

Standar ISO 14001 bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menetapkan prosedur manajemen yang memungkinkan mereka untuk mengatur, meningkatkan, serta mengurangi dampak lingkungan dari operasi yang dilakukan oleh perusahaan (Manurung et al., 2022). Tujuan umum adanya sistem manajemen lingkungan ISO 14001 adalah untuk mendukung perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran secara seimbang dengan kebutuhan sosial ekonomi. Sistem manajemen lingkungan seperti ISO 14001 sangat penting bagi perusahaan untuk memperhatikan pencemaran limbah dan polusi. Selain itu, sistem manajemen lingkungan yang resmi ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan (Riaz et al., 2022); Fitriani and Sunarsih (2024).

ISO 14001 adalah sistem manajemen lingkungan sukarela yang dimiliki oleh perusahaan. Sertifikat ISO 14001 diberikan oleh auditor eksternal kepada perusahaan setelah mengkaji sistem manajemen lingkungan di suatu perusahaan (Di Giacomo et al., 2017). Perusahaan dapat memperoleh ISO 14001 jika telah mengembangkan sistem manajemen lingkungan yang memenuhi standar dan persyaratan ISO. Perusahaan yang mengadopsi standar ini, menunjukkan komitmen perusahaan tidak hanya untuk mematuhi peraturan tetapi juga untuk perbaikan lingkungan yang berkelanjutan.

2.1.5. *Firm Size*

Firm size adalah skala perusahaan yang dapat diukur dengan melihat total aset, total penjualan maupun nilai kapitalisasi pasar (Septriyawati & Anisah, 2019); Sunarsih & Cahyani (2018); Sunarsih & Ferdiansyah (2016). Ukuran perusahaan dapat diukur dari total keseluruhan aset, sehingga dapat diartikan semakin besar skala total aset yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar pula ukuran dari perusahaan tersebut (Azizah et al., 2022); Sunarsih & Rosa (2017); Sunarsih & Nurhikmah (2017); Sunarsih & Dahlifah (2018); Fitriani and Sunarsih (2024). Perusahaan besar cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan atau laporan berkelanjutan salah satunya adalah pengungkapan emisi karbon. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki tekanan yang lebih besar dari para *stakeholder* terhadap masalah lingkungan

sehingga cenderung untuk lebih meningkatkan respon terhadap isu-isu lingkungan yang ada di sekitar perusahaan (Nastiti & Hardiningsih, 2022).

2.1.6. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi yang dapat digunakan untuk mengawasi dan mengontrol kinerja perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menyebabkan pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional, sehingga dapat menghalangi perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya pengungkapan lingkungan (Putri, 2017). Menurut Pratiwi (2017) kepemilikan institusional yang besar akan meningkatkan monitoring terhadap perusahaan, sehingga perusahaan akan mengungkapkan semua aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan citra positif dari stakeholder.

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan beroperasi bukan hanya untuk kepentingan sendiri, akan tetapi juga untuk kepentingan stakeholders. Menurut Fransisca (2020) semakin besar kepemilikan institusional, semakin besar juga dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi dan mengontrol manajemen agar dapat memaksimalkan kinerjanya. Perusahaan dinilai baik salah satunya dengan melakukan pengungkapan. Besarnya pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan akan menjadi pertimbangan untuk menentukan keputusan investasi bagi investor institusional. Dengan pengungkapan emisi karbon yang dilakukan perusahaan, maka investor institusional akan semakin yakin dengan keputusan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, karena perusahaan tidak hanya mementingkan kinerja keuangannya saja, tetapi juga memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.

Teori stakeholder mengartikan bahwa ada ikatan yang erat antara perusahaan dengan pemangku kepentingan yang menyebabkan keterbukaan atas segala kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan yang melakukan pengungkapan akan memberikan sinyal positif bagi para investor institusional dalam memutuskan investasi yang dilakukan. Chang dan Zhang (2015) menyatakan

bahwa ada pengaruh antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan lingkungan. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula hak investor institusional dalam melakukan pengungkapan karbon dalam perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amaliyah dan Solikhah (2019) bahwa dengan adanya inspeksi oleh institusi suatu perusahaan akan mendorong terwujudnya pengungkapan yang berefek pada meningkatnya kepercayaan para stakeholder dan kestabilan saham perusahaan.

2.1.7. Komite Audit

Komite audit (audit committee) adalah kumpulan dari berbagai individu atau sekelompok dewan komisaris perusahaan klien yang melaksanakan tugas khusus serta memprioritaskan perlindungan independensi dari manajemen (Tugiman, 1995). Keberadaan komite audit terhadap pengorganisasian perusahaan sangatlah penting karena komite audit turut adil dalam mengatur pengawasan atas kemajuan perusahaan. Saptiwi, 2019) menemukan bahwa jumlah pertemuan merupakan salah satu bukti yang memaparkan eminensi serta keunggulan utama dari komite audit. Jumlah pertemuan dilaksanakan dengan tujuan menjalankan pemeriksaan laporan dan mengawasi kegiatan corporate governance perusahaan ke arah yang lebih baik. Semakin berkualitas komite audit maka semakin mudah bagi perusahaan dalam menyampaikan informasi sesuai yang diharapkan stakeholder. Komite audit diukur dengan melihat banyaknya pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota komite audit dalam satu periode laporan tahunan perusahaan (Saptiwi, 2019)

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian yang masih relevan terkait topik penelitian yang akan dikaji oleh peneliti. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Kurnia et al., (2021). Sampel penelitian berjumlah 39 perusahaan sektor manufaktur di Indonesia dan 25 perusahaan sektor manufaktur di Australia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon di Indonesia meningkatkan nilai perusahaan. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan perusahaan manufaktur di Australia. Pengungkapan emisi karbon di Australia tidak memiliki pengaruh

terhadap nilai perusahaan dikarenakan penerapan pengungkapan emisi karbon memerlukan biaya yang mahal dan membutuhkan biaya yang lebih tinggi serta arus kas yang rendah.

Penelitian kedua dilakukan Dewayani & Ratnadi (2021) yang bertujuan untuk membuktikan pengaruh kinerja lingkungan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2018. Hasil penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan kinerja lingkungan dan profitabilitas tidak berpengaruh pada pengungkapan emisi karbon.

Penelitian ketiga dilakukan Firmansyah et al., (2021) yang memiliki tujuan untuk menguji pengaruh tata kelola dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda dengan data panel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan tata kelola yang baik dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dengan pengungkapan emisi karbon.

Penelitian keempat dilakukan Hariswan et al., (2022) yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon perusahaan sektor pertambangan tahun 2018-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan kehadiran wanita di dalam dewan direksi memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun, leverage dan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian kelima dilakukan Adrati & Augustine (2022) yang bertujuan untuk menganalisis dampak volume emisi karbon, pengungkapan emisi karbon dan pengungkapan praktik manajemen karbon terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 151 perusahaan penerima Penghargaan Keberlanjutan Indonesia tahun 2016-2018 dengan menggunakan model regresi berganda. Alat survei diadaptasi dari CDP *Questionnaires* untuk menilai pengungkapan *Carbon Management Practice*. Sementara itu, pengungkapan emisi karbon dioksida merupakan variabel dummy, dan emisi karbon dioksida menggunakan jumlah volume emisi karbon dioksida yang dilaporkan dalam laporan

keberlanjutan. Survei menemukan bahwa volume karbon memiliki dampak negatif pada kinerja perusahaan, pengungkapan emisi karbon tidak memiliki korelasi dengan kinerja perusahaan. Di sisi lain, ketika menggunakan kuesioner CDP sebagai alat pengukuran, pengungkapan praktik pengelolaan karbon memiliki dampak positif terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian keenam dilakukan oleh Mellyanawati & Sasongko (2023) yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Penelitian ini mencakup perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2018-2021. Metodologi yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan teknik analisis linier berganda menggunakan SPSS Statistics 24 sebagai alat pengujian data. Temuan menunjukkan bahwa paparan media mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Namun, profitabilitas, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan leverage tidak mempengaruhi pengungkapan emisi karbon.

Penelitian ketujuh Iratiwi & Sulfitri (2023) yang dilakukan untuk memperoleh bukti empiris bahwa kinerja karbon, tekanan pemangku kepentingan dan sertifikasi ISO 14001 berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan non keuangan. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan model regresi data panel digunakan untuk menghasilkan sampel sebanyak 72 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja karbon, ukuran perusahaan dan leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, namun tekanan pemangku kepentingan dan investasi modal berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan sertifikasi ISO 14001 tidak mendukung pengaruh negatif namun signifikan dan profitabilitas memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon untuk perusahaan sektor non-keuangan.

Penelitian kedelapan Afnilia & Astuti (2023) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh volume karbon, pengungkapan emisi karbon, dan tata kelola perusahaan dengan indikator direksi, komisaris independen, komite audit terhadap nilai perusahaan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor energi dan barang konsumsi primer. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive*

sampling dengan sampel sebanyak 81 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel yang diolah dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak Eviews versi 10. Hasil penelitian ini adalah dewan direksi memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan volume emisi karbon, pengungkapan emisi karbon, komisaris independen, komite audit, dan leverage tidak memiliki pengaruh yang terhadap nilai perusahaan.

2.3. Pengembangan Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dan rumusan penelitian tersebut disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan (Sugiono, 2017). Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

2.3.1. *Environmental Management System* berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Perusahaan yang memiliki sertifikat ISO 14001 terkait pengelolaan lingkungan telah memenuhi standar Internasional (Oktaviani et al., 2021). Dan perusahaan yang menggunakan sistem manajemen dalam rangka transparansi emisi karbon terhadap masyarakat dan regulator (Oktaviani et al., 2021). Hal ini dapat mengurangi risiko legal dan meningkatkan daya saing bisnis di pasar global sesuai dengan teori legitimasi.

EMS merupakan bentuk nyata tanggung jawab perusahaan terhadap aspek-aspek lingkungan (Jannah & Narsa, 2021). Penelitian Rohmah & Nazir (2022) serta Jannah & Narsa (2021) menyatakan bahwa sistem manajemen lingkungan berpengaruh positif pada pengungkapan emisi karbon. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi & Kurniawan, (2020); Puteri & Inawati, (2023); Suherman & Kurniawati, (2023). Namun, penelitian tersebut bertentangan dengan Linda & Shanti (2022) perusahaan yang sudah lolos sertifikasi dan memiliki sertifikasi ISO 14001 tapi tidak termotivasi untuk mengungkapkan emisi karbon di laporan berkelanjutannya karena merasa emisi karbon yang dihasilkan berada di

bawah ambang batas. Berdasarkan dengan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama (H1) adalah:

H1: *Environmental management system* berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*.

2.3.2. Firm Size Berpengaruh terhadap Carbon Emission Disclosure

Perusahaan dengan skala besar cenderung memiliki kapasitas yang besar pula untuk mengungkapkan emisi karbon secara transparan melalui laporan keberlanjutan dan partisipasi dalam inisiatif internasional seperti *Global Reporting Initiative* (GRI). Sumber daya yang tersedia dan tekanan dari pemangku kepentingan menentukan ukuran perusahaan. Perusahaan besar seringkali menjadi perhatian regulator, investor, dan masyarakat karena skala operasi mereka, yang mendorong pengungkapan lebih mendalam untuk menjaga legitimasi dan reputasi mereka. Perusahaan besar cenderung memiliki departemen yang didedikasikan untuk keberlanjutan, sumber daya untuk mengadopsi teknologi pengelolaan karbon yang lebih baik, dan kemampuan untuk melibatkan pihak ketiga dalam audit data emisi. Hal ini meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan yang mereka berikan. Namun, meskipun regulasi atau tekanan rantai pasokan terus mendorong perusahaan kecil untuk berkontribusi, pengungkapan mereka mungkin lebih terbatas.

Selain itu, peningkatan pengungkapan emisi karbon oleh perusahaan besar didukung oleh manfaat strategis, seperti peningkatan akses ke pasar modal dan hubungan yang lebih kuat dengan investor institusional yang semakin berfokus pada kriteria *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Regulasi yang semakin ketat di berbagai negara memperkuat peran ini dengan memberikan insentif kepada perusahaan yang melakukan pelaporan emisi karbon. Akibatnya, ukuran bisnis dapat dianggap sebagai faktor penting yang mengatur hubungan antara keberlanjutan bisnis dan kinerja keuangan jangka panjangnya.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Firmansyah et al., (2021) mengungkapkan bahwa *firm size* memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini dikarenakan perusahaan besar cenderung lebih taat untuk melakukan pengungkapan informasi emisi karbon kepada publik. Hasil

penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kiliç & Kuzey, (2019) yang menyatakan bahwa adanya tuntutan pemangku kepentingan kepada perusahaan untuk bertindak lebih etis dalam aktivitasnya mengakibatkan perusahaan besar menjadi lebih transparan dalam pengungkapan informasi kepada publik termasuk informasi terkait emisi karbon. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosa et al., (2024) yang menggambarkan bahwa *firm size* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon karena regulasi terhadap pengungkapan emisi karbon masih bersifat sukarela (*voluntary*) sehingga banyak perusahaan besar maupun kecil belum melakukan pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan dengan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga (H3) adalah:

H2: *Firm size* berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*.

2.3.3. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*

Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi yang dapat digunakan untuk mengawasi dan mengontrol kinerja perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menyebabkan pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional, sehingga dapat menghalangi perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya pengungkapan lingkungan (Putri, 2017). Menurut Pratiwi (2017) kepemilikan institusional yang besar akan meningkatkan monitoring terhadap perusahaan, sehingga perusahaan akan mengungkapkan semua aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan citra positif dari stakeholder. Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan beroperasi bukan hanya untuk kepentingan sendiri, akan tetapi juga untuk kepentingan stakeholders. Menurut Fransisca (2020) semakin besar kepemilikan institusional, semakin besar juga dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi dan mengontrol manajemen agar dapat memaksimalkan kinerjanya. Perusahaan dinilai baik salah satunya dengan

melakukan pengungkapan. Besarnya pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan akan menjadi pertimbangan untuk menentukan keputusan investasi bagi investor institusional. Dengan pengungkapan emisi karbon yang dilakukan perusahaan, maka investor institusional akan semakin yakin dengan keputusan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, karena perusahaan tidak hanya mementingkan kinerja keuangannya saja, tetapi juga memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Hasil dari penelitian Pratiwi (2017) mengatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap carbon emission disclosure karena pemegang saham institusional memiliki kemampuan lebih untuk mengendalikan perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham individu. Penelitian yang dilakukan oleh Amaliyah (2019) juga mengatakan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil penelitian sesuai dengan teori stakeholder, melalui pengawasan oleh institusi terhadap perusahaan akan membuat perusahaan lebih terbuka dan melakukan pengungkapan emisi karbon untuk menjaga image perusahaan dan menjaga kepercayaan para shareholder sehingga penyertaan kepemilikan saham perusahaan akan tetap terjaga. Fransisca, (2020) menyatakan hasil yang berbeda, bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap carbon emission disclosure, karena kepemilikan institusional hanya sebagai pihak eksternal yang tidak mempunyai dampak pada pengawasan dan pengendalian manajemen perusahaan. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang masih bertentangan, maka hipotesis berikut dinyatakan tanpa arah:

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap carbon emission disclosure.

2.3.4. Komite Audit berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*

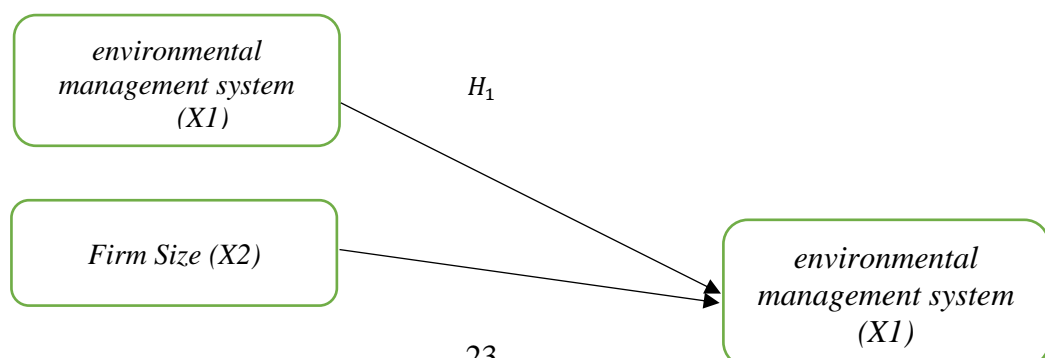
Komite audit adalah kumpulan dari berbagai individu atau sekelompok dewan komisaris perusahaan klien yang melaksanakan tugas khusus dan memiliki tanggung jawab dalam membantu auditor dalam melindungi independensinya dari manajemen (Tugiman, 1995). Suryono dan Prastiwi (2011) menemukan bahwa jumlah pertemuan merupakan salah satu bukti yang memaparkan eminensi serta keunggulan utama dari komite audit. Ahmad dan Nosakhare (2015) juga

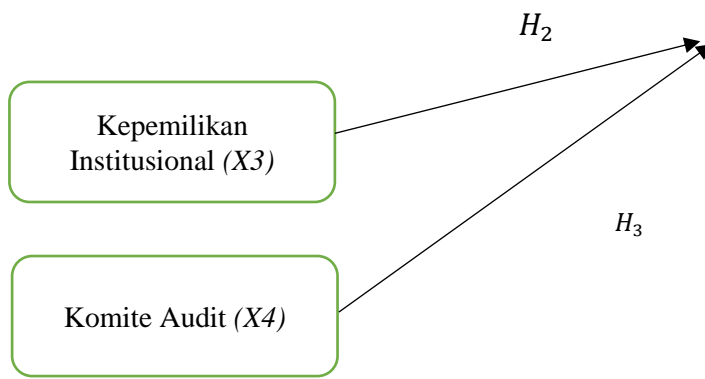
menyatakan bahwa efektivitas dan efisien informasi lingkungan ditandai dengan adanya peningkatan atas jumlah pertemuan komite audit. Teori stakeholder menegaskan bahwa ada hubungan antara kinerja sosial dan tingkah laku perusahaan sehingga teori ini memiliki peran penting pada kesinambungan perusahaan. Perusahaan yang memiliki komite audit akan semakin terdorong untuk menerapkan prinsip corporate governance yaitu prinsip transparansi. Jumlah pertemuan dilaksanakan dengan tujuan menjalankan pemeriksaan laporan dan mengawasi kegiatan corporate governance perusahaan ke arah yang lebih baik. Semakin rutin komite audit mengadakan pertemuan, semakin banyak wawasan yang didapat sehingga komite audit dapat memperkirakan keputusan yang diambil dalam rangka mengutamakan kepentingan stakeholders yaitu dengan melaksanakan pengungkapan emisi karbon. Semakin berkualitas komite audit maka semakin mudah bagi perusahaan dalam menyampaikan informasi sesuai yang diharapkan stakeholder. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amaliyah dan Solikhah (2019) dan Saptiwi (2019). Dari penjelasan tersebut akan diuji hipotesis sebagai berikut:

H4: Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual adalah model konseptual yang menunjukkan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai elemen yang diidentifikasi sebagai isu utama (Sugiyono, 2019:72). Dalam penelitian ini, peneliti menentukan dan *environmental management system*, *firm size*, *kepemilikan institusional* dan *komite audit* sebagai variabel independen dengan *carbon emission disclosure* sebagai variabel dependent. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 2.1

Kerangka Pikir Penelitian